

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Gambaran Umum Objek Penelitian

Kabupaten Indramayu sebuah kabupaten di Provinsi Jawa Barat, Indonesia. Kabupaten ini berbatasan dengan Laut Jawa di utara, Kabupaten Cirebon di tenggara, Kabupaten Majalengka dan Kabupaten Sumedang, serta Kabupaten Subang di barat. Kabupaten Indramayu terdiri atas 31 kecamatan, yang dibagi lagi atas sejumlah 313 desa dan kelurahan.

Satuan Kinerja Perangkat Daerah (SKPD) merupakan bagian dari pemerintah daerah yang melaksanakan fungsi pemerintahan dan pelayanan publik, baik secara langsung ataupun tidak langsung. Selaku Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah (PKPKD), kepala daerah yang menyerahkan sebagian kewenangannya kepada Kepala SKPD, pada akhirnya akan meminta kepala SKPD membuat pertanggungjawaban atas kewenangan yang dilaksanakan. Bentuk pertanggungjawaban tersebut berupa laporan keuangan.

Satuan Kinerja Perangkat Daerah (SKPD) disebut sebagai entitas akuntansi (*accounting entity*). Sebagai entitas akuntansi (*accounting entity*) Satuan Kinerja Perangkat Daerah harus melaksanakan proses akuntansi untuk menyusun laporan keuangan yang akan disampaikan kepada kepala daerah sebagai bentuk pertanggungjawaban pengelolaan keuangan (yang mencakup anggaran dan barang, diiringi dengan dana yang dikelola oleh bendahara fungsional). Pertanggungjawaban atas uang/kas yang ada di SKPD dikelola oleh bendahara pengeluaran selaku pejabat fungsional (Pasal 14 Pemendagri 13 Tahun 2013). Kabupaten Indramayu memiliki 32 SKPD yang terdiri dari Asisten, Bagian-bagian, Badan, Dinas, Inspektorat, Sekretariat dan RSUD.

Pemilihan Satuan Kinerja Perangkat Daerah (SKPD) di Kabupaten Indramayu sebagai objek penelitian dikarenakan SKPD merupakan bagian dari pemerintah daerah yang melaksanakan atas fungsi dan bertanggungjawab atas pemerintahan dan pelayanan publik, baik secara langsung ataupun tidak langsung.

SKPD Kabupaten Indramayu mempunyai peran dan tanggungjawab di bidang pengelolaan keuangan karena SKPD diberikan alokasi dana (anggaran) uang/kas yang dibutuhkan. Pada tahun 2018, Kabupaten Indramayu memperoleh opini audit WTP dari BPK. Hal tersebut merupakan kali keempat Pemerintah Daerah Kabupaten Indramayu mendapatkan opini WTP dari BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang dihasilkan (*sumber: Indramayukab.go.id*).

1.2. Latar Belakang Penelitian

Dalam era reformasi ini, setiap negara membutuhkan sistem pemerintahan yang baik termasuk juga di Indonesia. Dengan adanya otonomi daerah merupakan bagian dari reformasi pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Melalui otonomi daerah, kebijakan pemerintah pusat dalam segelintir bidang saat ini telah diubah menjadi kebijakan pemerintah daerah, termasuk kebijakan dalam pengelolaan keuangan daerah.

Reformasi keuangan pemerintah yang dilaksanakan pada awal tahun 2000 berdampak meningkatnya tuntutan masyarakat akan suatu pemerintahan yang bersih dan berwibawa. Paradigma baru tersebut mewajibkan setiap satuan kerja termasuk pemerintah daerah untuk mempertanggungjawabkan keuangan daerah secara transparan kepada publik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 1 tentang Perbendaharaan Negara. Pertanggungjawaban keuangan pemerintah daerah dalam bentuk laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) yang disajikan harus mampu memberikan informasi keuangan yang berkualitas.

Menurut Peraturan Pemerintah (PP) No.71 Tahun 2010, laporan keuangan merupakan laporan yang terstruktur mengenai posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan. Tujuan umum laporan keuangan adalah menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, arus kas, dan kinerja keuangan. Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) adalah gambaran mengenai kondisi dan kinerja keuangan entitas tersebut. Salah satu pengguna laporan keuangan pemerintah daerah adalah pemerintah pusat. Pemerintah pusat berkepentingan dengan laporan keuangan pemerintah daerah

karena pemerintah pusat telah menyerahkan sumber daya keuangan kepada daerah dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah. Komponen dari LKPD tersebut diantaranya: Laporan Realisasi APBD (LRA), Neraca, Laporan Arus Kas, dan CALK. LKPD yang berkualitas dapat menunjukkan bahwa SKPD tersebut telah melaksanakan fungsi eksekutif organisasi dengan baik.

Selanjutnya, dalam mewujudkan LKPD yang berkualitas LKPD yang diterbitkan atau disusun oleh SKPD harus memenuhi karakteristik-karakteristik kualitatif laporan keuangan sebagaimana dijelaskan dalam PP No.71 Tahun 2010. Karakteristik ini merupakan prasyarat normatif yang diperlukan agar LKPD dapat memenuhi kualitas yang dikehendaki, karakteristik-karakteristik tersebut menurut PP No. 71 Tahun 2010 yaitu relevan, andal dapat dibandingkan, dan dapat dipahami. Pemerintah daerah sudah seharusnya meningkatkan kualitas LKPD, yang mengandung informasi yang berguna untuk berbagai pihak, dan LKPD yang berkualitas dapat mewujudkan transparansi, akuntabilitas publik Pemerintah Daerah (PEMDA). Karena laporan keuangan yang baik mencerminkan kondisi pemerintahan yang baik pula.

LKPD yang berkualitas juga dilihat dari kinerja pemerintah daerah tersebut. Menurut PP No. 8 Tahun 2006 Kinerja Pemerintah Daerah adalah hasil dari kegiatan dan program pemerintah yang hendak dan telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas terukur. Untuk menilai kinerja Pemerintah Daerah dilakukan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah atau sering disebut dengan EKPPD. Disamping penilaian terhadap kinerja, pemerintah juga harus mempertanggungjawaban kinerja yang telah dicapainya. Kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan program atau kegiatan dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan disebut dengan akuntabilitas kinerja (Pusdiklat BPKP, 2007). Salah satu bentuk akuntabilitas kinerja instansi pemerintah adalah laporan keuangan. Sesuai dengan PP Nomor 8 Tahun 2006 tentang pelaporan keuangan dan kinerja instansi pemerintah bahwa laporan keuangan adalah bentuk pertanggungjawaban pengelolaan keuangan negara/daerah selama satu periode.

Berdasarkan Keputusan Gubernur Jawa Barat tentang Peringkat dan Status Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota tingkat daerah Provinsi Jawa Barat tahun 2018, Kabupaten Indramayu memiliki skor kinerja 3,2066. Nilai tersebut masih rendah karena Kabupaten Indramayu menempati posisi ke 13 dari 15 daerah kabupaten se-Jawa Barat.

Tabel 1.1

**Peringkat dan Status Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
Kabupaten Tingkat Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2018**

Peringkat	Nama Kabupaten	Prestasi	Skor
1	Kabupaten Kuningan	Sangat Tinggi	3,4301
2	Kabupaten Majalengka	Sangat Tinggi	3,3508
3	Kabupaten Tasikmalaya	Sangat Tinggi	3,3411
4	Kabupaten Garut	Sangat Tinggi	3,3335
5	Kabupaten Bogor	Sangat Tinggi	3,3287
6	Kabupaten Cianjur	Sangat Tinggi	3,3274
7	Kabupaten Ciamis	Sangat Tinggi	3,3164
8	Kabupaten Bekasi	Sangat Tinggi	3,2832
9	Kabupaten Bandung Barat	Sangat Tinggi	3,2589
10	Kabupaten Bandung	Sangat Tinggi	3,2492
11	Kabupaten Karawang	Sangat Tinggi	3,2433
12	Kabupaten Sukabumi	Sangat Tinggi	3,2260
13	Kabupaten Indramayu	Sangat Tinggi	3,2066
14	Kabupaten Cirebon	Sangat Tinggi	3,1749
15	Kabupaten Purwakarta	Sangat Tinggi	3,0943

Sumber : pemksm.jabarprov.go.id (data diolah 2019)

Pengukuran kinerja Pemerintah Daerah (Pemda) harus mencakup pengukuran kinerja keuangan dan non keuangan. Indikator kinerja pemda meliputi indikator *input*, *process*, *output*, *outcome*, *benefit*, dan indikator *impact*. Indikator masukan (*input*) misalnya, jumlah dana yang dibutuhkan, jumlah pegawai yang dibutuhkan, dan jumlah insfrastruktur yang ada. Indikator proses (*process*)

misalnya, ketaatan pada peraturan perundang-undangan, dan rata-rata yang diperlukan untuk memproduksi atau menghasilkan layanan jasa. Indikator keluaran (*output*) misalnya, jumlah produk atau jasa yang dihasilkan, dan ketepatan dalam memproduksi barang atau jasa. Indikator hasil (*outcome*) misalnya, produktifitas para pegawai. Indikator manfaat (*benefit*) misalnya, tingkat kepuasan masyarakat dan partisipasi masyarakat. Indikator kinerja pemerintah daerah yang terakhir adalah indikator dampak (*impact*) misalnya, peningkatan kesejahteraan masyarakat dan peningkatan pendapatan masyarakat.

Dibalik skor kinerja yang termasuk peringkat 3 terbawah dari katagori daerah kabupaten se- Jawa Barat, Kabuapten Indramayu mampu memperoleh opini WTP dari BPK selama empat tahun berturut-turut. Hal ini yang mendasari penulis ingin meneliti faktor-faktor apa saja yang mendukung SKPD Kabupeten Indramayu memperoleh opini WTP dari BPK dibalik kinerjanya yang termasuk peringkat 3 terbawah tersebut.

Keberhasilan dalam penyajian laporan keuangan yang berkualitas bergantung pada pelaksanaanya atau Sumber Daya Manusianya (SDM). Menurut penelitian yang dilakukan oleh Yuliani dan Agustini (2016) menyatakan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas laporan keuangan diantaranya Kompetensi Sumber Daya Manusia, Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah, dan Pengendalian Intern Pemerintah.

Menurut Data Satuan Pendidikan (NPSN) Kemendikbud, tingkat Pendidikan masyarakat di Kabupaten Indramayu masih tergolong sangat rendah. Dari total 1.573 masyarakat yang tercatat, 1.043 diantaranya, lulusan SD sederajat, 304 orang lulusan SMP sederajat, 89 orang lulusan SMA sederajat, dan 137 orang lulusan SMK. Hal ini mempengaruhi tingkat Pendidikan PNS yang bekerja di instansi pemerintahan pada Kabupaten Indramayu. Menurut Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kabupaten Indramayu, sebanyak 5.538 Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Kabupaten Indramayu masih berpendidikan rendah sehingga BKD memiliki rencana untuk merasionalisasi PNS lulusan SD, SMP, dan SMA karena diperkirakan PNS yang berpendidikan rendah memiliki SDM yang rendah sehingga menghambat kinerja dari instansi pemerintah yang ada di Kabupaten Indramayu.

Namun hingga kini rencana tersebut belum dapat terealisasi karena pada kenyataannya Pemerintah Kabupaten Indramayu masih sangat kekurangan tenaga PNS terutama sektor pendidikan. Jika dilakukan rasionalisasi, maka dikhawatirkan Pemerintah Kabupaten Indramayu semakin kekurangan tenaga PNS. Hal tersebut mungkin yang mempengaruhi skor kinerja pada SKPD Kabupaten Indramayu.

Kualitas sumber daya manusia adalah kemampuan sumber daya manusia untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang diberikan dengan bekal pendidikan, pelatihan, pengalaman, sertifikasi, maupun uji kompetensi yang memadai. Dalam variabel ini sumber daya manusia mengukur bagaimana kualitas sumber daya manusia pada umumnya. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Andini dan Yusrawati (2015) yang menyatakan bahwa kompetensi SDM berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan daerah. Penelitian menurut Yensi *et al* (2014) menyatakan bahwa Kompetensi berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah dikarenakan dalam dunia pemerintah, setiap bagian dalam pemerintah harus diisi oleh orang yang tepat, yaitu yang memiliki kompetensi yang sesuai dengan kualifikasi yang telah ditentukan. Dalam pengelolaan bagian keuangan harus diisi oleh sumber daya manusia yang memiliki kompetensi akuntansi dan ilmu-ilmu keuangan terkait lainnya. Jadi, dapat diartikan apabila semakin baik kompetensi sumber daya manusia maka akan semakin baik pula kualitas laporan keuangan yang dihasilkan. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Hasibuan (2018) menyatakan bahwa kompetensi SDM secara parsial tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kualitas kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

Kualitas laporan keuangan pemerintah daerah tidak hanya dipengaruhi oleh kompetensi sumber daya manusia. Kualitas laporan keuangan juga dapat dipengaruhi oleh sistem pengendalian intern pemerintah. Dalam PP No. 60 Tahun 2008 dijelaskan bahwa Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) adalah Sistem Pengendalian Intern yang diselenggarakan secara menyeluruh dilingkungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Pengawasan Intern adalah seluruh proses kegiatan audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi dalam rangka memberikan keyakinan

yang memadai bahwa kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan tolok ukur yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien untuk kepentingan pimpinan dalam mewujudkan tata pemerintahan yang baik.

Selama tahun 2018, Kejaksaan Agung Kabupaten Indramayu telah menangani delapan kasus korupsi dan tiga telah masuk penyidikan. Dari tiga kasus yang telah masuk penyidikan, Kejari menyelamatkan uang negara sebesar Rp89 juta, kasus korupsi sepertinya bukan hal yang asing lagi di Kabupaten Indramayu. Sebelumnya pada 2016 mantan Bupati Kabupaten Indramayu Irianto Syaifuddin alias Yance ditahan oleh Kejari Indramayu terkait kasus korupsi pembebasan lahan seluas 82 hektar untuk Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) di Sumur Adem, Indramayu pada tahun 2004. Dalam penyelidikan kasus tersebut diduga telah menyebabkan kerugian negara sebesar Rp4,1 miliar. Pada tahun 2018 puluhan masyarakat Kabupaten Indramayu melakukan aksi menuntut KPK untuk mengusut tuntas kasus Rohadi, Panitera Pengadilan Tinggi Jakarta Utara, terkait kasus gratifikasi untuk perizinan Rumah Sakit Reysa. Rohadi diketahui telah memberikan sebuah mobil Pajero Sport dengan nomor polisi B 104 ANA kepada Bupati Indramayu, Anna Shopanah. Perlu diketahui bahwa kejahatan terjadi bukan hanya karena adanya niat dari pelaku, tetapi juga karena adanya kesempatan untuk melakukan tindakan kejahatan tersebut. Maka dari itu, untuk memberantas korupsi diperlukan pengawasan yang ketat serta pengendalian yang baik dari masyarakat, penegak hukum, pemerintah, serta stakeholder lainnya. Hal ini bertujuan agar kegiatan pemerintahan dapat berjalan setransparan mungkin sehingga jika ada hal-hal yang dianggap mencurigakan dapat segera diketahui dan diusut tuntas. Hal ini menarik untuk diteliti, karena dibalik sistem pengendalian intern pemerintah yang rendah dimana terdapat banyak temuan kasus korupsi di Kabupaten Indramayu, akan tetapi mampu memperoleh opini WTP dari BPK yang artinya kualitas laporan keuangan yang dihasilkan bagus.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Putra dan Amar (2013) menyatakan bahwa penerapan sistem pengendalian intern pemerintah berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah. Artinya dengan penerapan sistem pengendalian intern pemerintah yang semakin baik maka

kualitas laporan keuangan juga akan menjadi lebih baik. Penelitian yang dilakukan oleh Nurillah (2014) menyatakan bahwa sistem pengendalian intern pemerintah mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Yensi *et al* (2014) menyatakan bahwa tidak terdapat pengaruh antara sistem pengendalian intern terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Sistem pengendalian intern menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi laporan keuangan pemerintah daerah sejalan dengan masih banyaknya temuan BPK atas lemahnya sistem pengendalian intern yang mengakibatkan kebocoran dan ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan sehingga BPK memberi opini Tidak Wajar (TW) bahkan Tidak Memberikan Pendapat (TMP) atas sebahagian besar LKPD di Indonesia. Sehingga masih perlunya peningkatan terhadap sistem pengendalian intern, karena apabila semakin baik sistem pengendalian intern maka akan berdampak meningkatkan kualitas informasi laporan keuangan yang dihasilkan.

Tidak hanya sumber daya manusia dan sistem pengendalian intern pemerintah yang diperlukan dalam penyusunan laporan keuangan, namun dalam menghasilkan laporan keuangan juga perlu adanya sistem akuntansi keuangan daerah yang baik. Menurut Permendagri No. 64 Tahun 2013 menjelaskan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD) adalah serangkaian prosedur mulai dari prosedur, penyelenggara, peralatan, dan elemen lain untuk mewujudkan fungsi akuntansi mulai dari analisis transaksi sampai dengan pelaporan keuangan dilingkungan organisasi pemerintah daerah. APBD, dilaksanakan sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi yang diterima umum. Sesuai dengan amanat UU No. 17 Tahun 2003 dan PP No. 71 Tahun 2010 maka mulai tahun 2015 pemerintah kota ataupun Pemda wajib menggunakan basis akrual. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar (Ratmono dan Sholihin, 2017:11).

Dalam mengelola keuangan daerah, pemerintah menggunakan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD) yang sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2005 Tentang Standar Akuntansi Keuangan dan Peraturan

Pemerintah No. 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan yang bertujuan untuk memberikan informasi dalam pertanggungjawaban pengguna dana. Pada dasarnya pemerintah daerah telah berupaya untuk menyusun laporan keuangan dengan menggunakan sistem akuntansi keuangan daerah yang diharapkan mampu mewujudkan tercapainya transparansi dan akuntabilitas. Oleh karena itu, informasi yang terdapat pada laporan keuangan pemerintah harus memperhatikan informasi yang disajikan dalam laporan keuangan agar dalam perencanaan, pengendalian, dan pengambilan keputusan dapat dilakukan dengan baik.

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Mokoginta *et al* (2017) menyatakan bahwa Sistem Akuntansi Keuangan Daerah berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan daerah, pemerintah diwajibkan menyusun laporan keuangan sesuai dengan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah yang telah diatur oleh pemerintah daerah yang berpatokan pada Standar Akuntansi Pemerintah dalam Undang-undang yang bersifat mengikat seluruh pemerintah daerah. sehingga dapat disimpulkan bahwa penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah yang baik dan benar berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah. Sedangkan penelitian menurut Ihsanti (2014) menyatakan bahwa penerapan SAKD tidak berpengaruh signifikan positif dan tidak mempengaruhi kualitas laporan keuangan, hal ini terjadi karena penerapan SAKD belum sepenuhnya dilaksanakan sesuai dengan standar yang berlaku.

Berdasarkan fenomena dan beberapa kesimpulan dari penelitian terdahulu yang telah disebutkan diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah, terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah Pemerintah Daerah (Studi Kasus Pada SKPD Kabupaten Indramayu Tahun 2019”**.

1.3. Rumusan Masalah

Berhubungan dengan kualitas laporan keuangan yang dapat dipahami, relevan, andal dan dapat dibandingkan, laporan keuangan merupakan faktor penting bagi pemerintah yang harus diperhatikan dalam menyajikan laporan keuangan dan

merupakan sebuah media bagi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan kinerja keuangannya kepada publik. Pemerintah harus mampu menyajikan laporan keuangan yang mengandung informasi keuangan yang berkualitas. Sehingga dalam menyajikan laporan keuangan tidak ada kesalahan. Selain itu, kompetensi SDM, SPIP dan SAKD sangat mempengaruhi hasil dari laporan keuangan, apakah laporan keuangan berkualitas dan dapat dipertanggungjawabkan atau tidak.

Dibalik kinerja pemerintah yang masuk kedalam peringkat 3 terbawah katagori kabupaten se- Jawa Barat, Kabupaten Indramayu memperoleh opini WTP dari BPK. Tingkat Pendidikan masyarakat di Kabupaten Indramayu masih tergolong sangat rendah. Hal ini mempengaruhi tingkat Pendidikan PNS yang bekerja di instansi pemerintahan pada Kabupaten Indramayu, PNS yang berpendidikan rendah memiliki SDM yang rendah sehingga menghambat kinerja dari instansi pemerintah yang ada di Kabupaten Indramayu. Serta selama tahun 2018, Kejaksaan Agung Kabupaten Indramayu telah menangani 8 kasus korupsi. Hal ini menyebabkan kasus korupsi di Indramayu tidak asing lagi.

1.4. Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan pada latar belakang penelitian, maka penulis membuat identifikasi masalah diantaranya sebagai berikut:

1. Bagaimana kompetensi sumber daya manusia, sistem pengendalian intern pemerintah, sistem akuntansi keuangan daerah dan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah pada SKPD Kabupaten Indramayu?
2. Apakah terdapat pengaruh secara simultan antara kompetensi sumber daya manusia, sistem pengendalian intern pemerintah, dan sistem akuntansi keuangan daerah terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah pada SKPD Kabupaten Indramayu?
3. Apakah terdapat pengaruh secara parsial :
 - a. Kompetensi sumber daya manusia terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah pada SKPD Kabupaten Indramayu?
 - b. Sistem pengendalian intern pemerintah terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah pada SKPD Kabupaten Indramayu?

- c. Sistem akuntansi keuangan daerah terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah pada SKPD Kabupaten Indramayu?

1.5. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pertanyaan penelitian yang telah diuraikan diatas, maka tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui kompetensi sumber daya manusia, sistem pengendalian intern pemerintah, sistem akuntansi keuangan daerah dan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah pada SKPD Kabupaten Indramayu.
2. Untuk mengetahui pengaruh secara simultan kompetensi sumber daya manusia, sistem pengendalian intern pemerintah, dan sistem akuntansi keuangan daerah terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah pada SKPD Kabupaten Indramayu.
3. Untuk mengetahui secara parsial:
 - a. Pengaruh kompetensi sumber daya manusia terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah pada SKPD Kabupaten Indramayu.
 - b. Pengaruh sistem pengendalian intern pemerintah terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah pada SKPD Kabupaten Indramayu.
 - c. Pengaruh sistem akuntansi keuangan daerah terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah pada SKPD Kabupaten Indramayu.

1.6. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

- a. Bagi Penulis

Hasil penelitian ini dapat menambah wawasan keilmuan mengenai kompetensi sumberdaya manusia, sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP) dan pengaruh sistem akuntansi keuangan daerah (SAKD) terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah pada Kabupaten Indramayu,

serta diharapkan penelitian ini mampu memenuhi syarat dalam menempuh Sidang Sarjana Akuntansi Program Studi Akuntansi Universitas Telkom Bandung.

b. **Bagi Pemerintah**

Hasil penelitian ini menjadi bahan informasi serta masukan bagi pemerintah daerah Kabupaten Indramayu dalam rangka menerapkan kompetensi sumber daya manusia, sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP) dan sistem akuntansi keuangan daerah (SAKD) guna meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

c. **Bagi Peneliti Selanjutnya**

Hasil penelitian ini dapat menjadi tambahan literatur bagi penelitian selanjutnya sepanjang masih dalam lingkup variabel yang sama.

1.7. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup penelitian itu sendiri berarti batasan, yang artinya dalam sebuah pelaksanaan penelitian guna untuk menghindari pembahasan yang meluas dan menyimpang maka harus dibuatlah batasan masalah.

1.7.1. Lokasi dan Objek Penelitian

Lokasi yang dipilih pada penelitian ini dilaksanakan di Kabupaten Indramayu. Objek penelitian yang dipilih adalah 32 Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten Indramayu. Penulis membuat dan menyebar kuesioner kepada objek yang dipilih agar menghasilkan data.

1.7.2. Waktu dan Periode Penelitian

Waktu yang dibutuhkan untuk melakukan penelitian ini yaitu dari tanggal 25 April 2019 s/d 25 Mei 2019.

1.7.3. Variabel Penelitian

Dalam penelitian ini terdapat 2 (dua) variabel didalamnya yaitu variabel dependen dan variabel independen.

1. Variabel Independen (X) pada penelitian ini adalah Kompetensi Sumber daya Manusia (X1), Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (X2), dan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (X3).

2. Variabel Dependen (Y) pada penelitian ini adalah Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

1.8. Sistematika Penulisan Tugas Akhir

Dalam penulisan tugas akhir ini terdapat sistemakita penulisan, dimana didalam tugas akhir ini terbagi atas beberapa bab, yaitu terdiri atas :

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini penulis menguraikan Objek Penelitian, Latar Belakang pemilihan judul, Perumusan Masalah, Pertanyaan Penelitian, Tujuan Penelitian, Aspek Penelitian serta Ruang Lingkup penelitian, sehingga permasalahan tersebut memiliki titik fokus dan tidak mengembang dari judul yang telah dibuat.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini berisi tentang tinjauan pustaka penelitian tentang teori pendukung untuk variable yang akan diteliti, bab ini juga membahas secara ringkas mengenai penelitian terdahulu, kerangka pemikiran, hipotesis penelitian sebagai jawaban sementara atas masalah penelitian, serta lingkup penelitian.

BAB III METODE PENELITIAN

Dalam bab ini berisi tentang langkah sistematis yang ditempuh untuk mencapai tujuan dari topik bahasan yang menjelaskan mengenai metode penelitian, parameter penelitian, rincian kerja prosedur penelitian, serta alat dan bahan yang digunakan dalam penelitian.

BAB IV ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini berisi tentang pemaparan dan analisis data-data yang didapatkan dari hasil penelitian.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Dalam bab ini berisi tentang kesimpulan dari hasil penelitian serta saran untuk penelitian selanjutnya.

HALAMAN INI SENGAJA DIKOSONGKAN